

# MENGUKUR KOMITMEN PARTAI POLITIK TERHADAP PERDAMAIAN ACEH

## PENGANTAR

Kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), atau lebih dikenal sebagai MoU Helsinki, hampir berumur lima tahun, sejak kesepakatan itu ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Berakhirnya konflik di Aceh, bukan berarti menghapus total peluang terjadinya konflik kembali. Masih diperlukan komitmen semua pihak untuk proses penguatan perdamaian. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)—sebagai pilar penting dalam pemerintahan Aceh—yang terdiri dari partai politik (parpol) nasional dan lokal mempunyai tanggungjawab atas terwujudnya perdamaian Aceh yang berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan. Karena itu masyarakat perlu tahu komitmen parpol terhadap perdamaian, kesejahteraan dan keadilan di Aceh.

Melalui dukungan USAID dan IRD-SERASI Project, Social Institute for Community Development (SICD) Aceh bekerjasama dengan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) melakukan sebuah survei untuk mengetahui komitmen parpol-parpol di DPRA terhadap ketiadaan konflik dengan berbagai bentuk kekerasan. Survei ini juga mengidentifikasi komitmen parpol-parpol tersebut atas terwujudnya kesejahteraan dan keadilan di Aceh melalui lembaga DPRA yang reformasi, transparan, dan mendorong adanya partisipasi publik.

## METODOLOGI SURVEI

Survei ini menggunakan pendekatan institusional terhadap 11 (sebelas) parpol di DPRA. Model pendekatan ini menjadikan hasil survei sebagai sikap resmi dari parpol yang bersangkutan. Sebelas responden—terdiri atas sebelas pemimpin parpol atau orang yang dimandatkan mewakili parpolnya—telah berpartisipasi penuh dalam survei yang dilakukan sepanjang bulan Maret - April 2010. Proses survei dilakukan secara langsung dengan interview (tatap muka) serta pengisian kuesioner oleh responden didampingi anggota tim peneliti untuk menjamin pemahaman yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Keabsahan sikap parpol ditunjukkan dari tandatangan responden dan pembubuhan stempel (cap) parpol pada lembar kuesioner.

## HASIL

- **Komitmen parpol terhadap ketiadaan konflik dengan berbagai bentuk kekerasan di Aceh**

Kesebelas parpol memiliki komitmen penuh atau 100 persen menjaga dan mendukung perdamaian dalam arti ketiadaan konflik dengan berbagai bentuk kekerasan. Seluruh parpol menyatakan menolak pihak manapun yang mengganggu perdamaian termasuk memberikan sanksi yang tegas terhadap anggota partai yang mengganggu perdamaian. Komitmen ini dipertegas dengan keinginan parpol yang bersedia menyelesaikan setiap konflik secara damai bila muncul di kemudian hari. Selanjutnya, parpol juga berkomitmen penuh untuk melakukan kampanye perdamaian secara aktif, mengingat menjaga perdamaian bukan hanya tugas dari pihak keamanan dan eksekutif, tetapi juga kewajiban seluruh masyarakat Aceh guna menghadirkan perdamaian yang abadi. Komitmen penuh ini menjadi modal awal penguatan perdamaian di Aceh.

- **Komitmen parpol terhadap aspek-aspek yang mendukung perdamaian yang berkelanjutan**

### A. Kesejahteraan & Keadilan

\* Keterangan: (v) BERKOMITMEN dan (X) TIDAK berkomitmen

Komitmen :	PA	PD	PG	PAN	PKS	PPP	PKPI	PDA	PBB	PKB	PP
Menjadi pelopor untuk memperjuangkan Pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat	v	v	v	v	v	X	v	v	v	v	v
Untuk mengumumkan komposisi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat secara terbuka	v	v	X	v	v	v	v	v	v	v	v
Untuk mengalokasikan anggaran bagi kelompok masyarakat rentan (korban konflik, janda korban konflik, dan pemuda pengangguran)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Untuk mendorong terbukanya akses yang adil bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan ekonomi, hukum, politik dan budaya	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

### B. Transparansi

Komitmen :	PA	PD	PG	PAN	PKS	PPP	PKPI	PDA	PBB	PKB	PP
Terhadap pengelolaan pemerintahan Aceh yang transparan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Untuk mengumumkan anggaran setiap dinas dan dapat diakses publik.	v	v	X	v	v	v	v	v	v	v	X
Keterbukaan pembahasan APBA di DPRA .	v	v	X	v	v	v	v	v	v	v	v
Menjadi pelopor untuk mendorong pemberian akses informasi kepada Publik terhadap alokasi anggaran parlemen	v	X	X	v	v	v	v	v	v	v	v

### C. Partisipasi Publik

Komitmen :	PA	PD	PG	PAN	PKS	PPP	PKPI	PDA	PBB	PKB	PP
Mewajibkan adanya naskah akademis dan melibatkan partisipasi masyarakat seperti yang diatur dalam Qanun No. 3/2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun?	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Untuk menolak rancangan qanun dan kebijakan pemerintah yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

### D. Reformasi Kelembagaan DPRA

Komitmen :	PA	PD	PG	PAN	PKS	PPP	PKPI	PDA	PBB	PKB	PP
Menjadikan tingkat kehadiran sebagai salah satu indikator kesungguhan DPRA melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Dalam memberikan sanksi pemotongan gaji dan tunjangan kepada anggota DPRA yang diketahui mangkir tiga kali berturut-turut	X	v	X	X	X	X	v	v	v	v	v
Terhadap semua rapat bersifat terbuka dan semua risalah sidang dapat diakses oleh publik	X	v	X	v	v	X	v	v	X	v	v
Untuk mengumumkan masa reses terlebih dahulu kepada konstituen agar jadwal dan tempat kunjungan anggota diketahui, dan dapat digunakan rakyat untuk berdialog, serta melaporkan secara terbuka kepada konstituen tentang hasil kunjungan tersebut.	v	X	v	v	v	v	v	v	X	v	v
Agar Badan Kehormatan (BK) DPRA mengumumkan kepada publik sanksi yang diberikan kepada anggota DPRA yang tidak disiplin dan melanggar kode etik	v	v	X	v	v	v	v	v	v	v	v

PA = Partai Aceh, PD = Partai Demokrat, PG = Partai Golkar, PAN = Partai Amanat Nasional, PKS = Partai Keadilan Sejahtera, PPP = Partai Persatuan Pembangunan, PKPI = Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PDA = Partai Daulat Atjeh, PBB = Partai Bulan Bintang, PKB = Partai Kebangkitan Bangsa, PP = Partai Patriot.